



# **RENCANA KERJA**

**BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2021**

## **BAB I P E N D A H U L U A N**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, BPPKAD Kabupaten Sampang menyusun Renja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

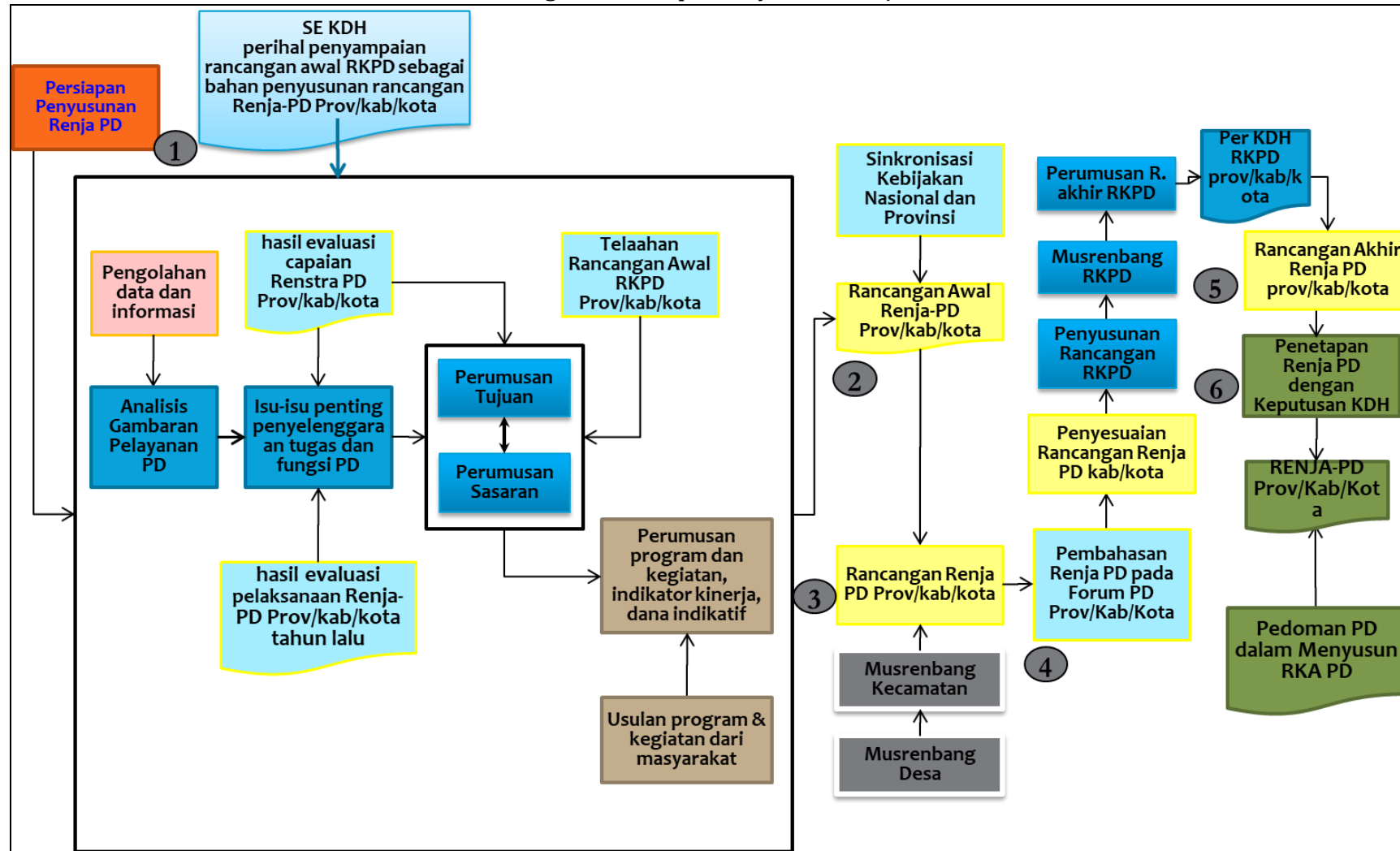
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- e. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2023.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu “ Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat “ dan penjabaran dari tujuan BPPKAD Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra BPPKAD Tahun 2014 – 2024 yaitu “ **Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah dan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien**”.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum BPPKAD Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

- Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);



37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.
39. Peraturan Bupati Sampang No. 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja BPPKAD Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BPPKAD Tahun 2022 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra BPPKAD Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Anggaran dan Kinerja BPPKAD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi:

#### **BABI PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Keuatannya.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPPKAD TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dalam Penyusunan Renja Tahun 2022 ini proses selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang capaian pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Dengan adanya evaluasi ini dapat diketahui kemampuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam menjalankan program dan kegiatan. Disamping itu dapat diketahui kelemahan dan hambatan/kendala yang menyebabkan program kegiatan tidak dapat tercapai.

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Sampang

## BPPKAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2021 )	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/SubKegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah PAD	206.012.769.299	168.778.440.667	179.581.644.475	175.518.944.949	97,74	184.326.810.711	184.326.810.711	89,47
		Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Des 2023	Des 2018	Des 2019	Des 2019	100	Des 2020	Des 2020	60
			Okt 2024	Sept 2019	Okt 2020	Okt 2020	100	Okt 2021	Okt 2021	60
		Persentase Defiasi penyerapan keuangan sesuai target	5	8,45	6,50	11,25	24,73	6	6	60
		Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	Agustus 2024	Juli 2019	Jul-20	Sept 2020	83,33	Agst 2021	Agst 2021	60

		<b>Persentase Data BMD yang Valid</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>
4.02.01.01.01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah Surat Terkirim	12.490	1.161	1.500	1.264	84,27		2425	19,42
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	72	12	12	12	100,00		24	33,33
		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Memperoleh Jasa Perizinan	288	48	68	68	100,00		116	40,28
		Premi asuransi atas gedung, kendaraan & Genset	100	100	100	100	100,00		100	100
		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	36	36	-	-			36	100,00
		Jumlah pemeliharaan Jasa Cleaning Servise,	12	2	2	2	100,00		4	33,33
		Jumlah honorarium tenaga kontrak daerah terbayar dan Satpam	936	156	156	156	100,00		312	33,33
		jumlah langganan surat kabar	5475	0	730	730	100,00		730	13,33
		jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	6250	975	784	572	72,96		1547	24,75

		jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	1564	213	300	298	99,33		511	32,67
4.02.01.01.02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	438	71	70	69	98,57		140	31,96
		Jumlah barang cetakan	90	15	17	17	100,00		32	35,56
		Jumlah penggandaan	1050000	56000	60000	48000	80,00		104000	9,90
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	730	720					720	98,63
		jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	1.250	975					975	78,00
		jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	300	213					213	71,00
		Jumlah Komponen instalasi listrik	167	25	25	28	112,00		53	31,74
		Jumlah Alat Kebersihan Yang Disediakan	180	0	36	36	100,00		36	20,00
4.02.01.01.03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah	141	9	12	21	175,00		30	21,28
		Jumlah Koordinasi Luar Daerah	703	140	82	50	60,98		190	27,03
<b>4.02.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>
4.02.01.02.01	Pembangunan/ Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	36	6	6	6	100,00		12	33,33

4.02.01.02.02	Pengadaan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	Jumlah Kendaraan dinas R4 yang dipelihara	42	7	8	7	87,50		14	33,33
4.02.01.02.03	Pembangunann / rehan pemeliharaan rumah jabatan	jumlah rumah dinas terpelihara	24	5	4	4	100,00		9	37,50
4.02.01.02.04	Pengadaan/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	1799	294	400	400	100,00		694	38,58
<b>4.02.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100		<b>100</b>	<b>100,00</b>
4.02.01.03.01	Pelaksanaan Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar	73	20	16	16	100,00		36	49,32
<b>4.02.01.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAPORAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>		<b>67</b>	<b>66,67</b>
4.02.01.04.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	jumlah laporan capaian kienrja dan keuangan, jumlah laporans semesteran, jumlah laporan keuangan akhir tahun	42	7	4	4	100,00		11	26,19

4.02.01.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	24	3	3	3	100,00		6	25,00
4.02.01.04.03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	12	2	2	-	0,00		2	16,67
<b>4.02.01.04.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN dan PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase realisasi PAD terhadap target PAD</b>	<b>100,00</b>		<b>100</b>	<b>103,55</b>	<b>103,55</b>		<b>103,55</b>	<b>103,55</b>
4.02.01.04.17.01	Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	jumlah regulasi tentang pendapatan daerah	18	1	3	5	166,67		6	33,33
4.02.01.04.17.02	Pendaftaran, Pendataan, Penagihan & Keberatan Pajak Daerah	jumlah wilayah pendataan dan penagihan pajak	84	14	14	14	100,00		28	33,33
		jumlah wajib pajak terdata	8.100	1.350	1.350	1.350	100,00		2700	33,33
4.02.01.04.17.03	Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	jumlah laporan PAD, DBH Desa	18	3	3	3	100,00		6	33,33
4.02.01.04.17.04	Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah)	jumlah penetapan pajak daerah	18	3	3	3	100,00		6	33,33



	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PBB-P2</b>	<b>Persentase penerimaan PBB-P2</b>	<b>100</b>	<b>90</b>					<b>90</b>	<b>90</b>
	Penyusunan regulasi dan sosialisasi pengelolaan PBB-P2	jumlah regulasi ttg pengelolaan PBB-P2	2	0					0	0,00
		jumlah sosialisasi regulasi pengelolaan PBB-P2	4	0					0	0,00
	Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-2	jumlah objek pajak yang terbentuk (SISMIOP)	14	14					14	100,00
		jumlah data objek pajak	31.386	31.891					31891	101,61
	Pengelolaan Data dan Informasi PBB-P2	jumlah blanko spt	50	90					90	180,00
		jumlah software dan hardware terpelihara	1	1					1	100,00
	fasilitasi penagihan dan keberatan PBB-P2	jumlah laporan data hutang PBB	1	1					1	100,00
<b>4.02.01.04.16</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN AKUTANSI DAN PELAPORAN</b>	<b>Persentase PD Yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>
4.02.01.04.16.01	Penyusunan regulasi dan Sosialisasi akuntansi keuangan daerah	jumlah sosialisasi regulasi akutnansi keu. daerah	18	2					2	11,11
4.02.01.04.16.02	Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD	Jumlah Validasi data harian penerimaan	57.000	15.354	9.500	15.354	161,62		30708	53,87

		Jumlah Rekonsiliasi data penerimaan	72	12	12	12	100,00		24	33,33
		Jumlah Laporan Penerimaan Semesteran dan Akhir Tahun	12	2	2	2	100,00		4	33,33
4.02.01.04.16.03	Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD	Jumlah Validasi data harian Pengeluaran	66.000	12.973	11.000	12.973	117,94		25946	39,31
		Jumlah Rekonsiliasi data Pengeluaran	72	12	12	12	100,00		24	33,33
		Jumlah Laporan Pengeluaran Semesteran dan Akhir Tahun	12	2	2	3	150,00		5	41,67
4.02.01.04.16.04	penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah	Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD serta LKD	18	3	3	3	100,00		6	33,33
		Jumlah asistensi dan entry bersama LK SKPD	6	1	1	1	100,00		2	33,33
		Jumlah Audit LKD BPK RI	6	1	1	1	100,00		2	33,33
4.02.01.04.16.05	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengembangan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan e-PAD	90	90	90	70,71	78,57		161	178,57
		Jumlah Pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan E-PAD	18	1	1	-	0,00		1	5,56

		Jumlah Pengadaan Sarana Parasarana Pengembangan Aplikasi	6	1	1	1	100,00		2	33,33
<b>4.02.01.04.19</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Laporan BMD yang tepat Waktu</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>
4.02.01.04.19.01	Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	1	2	1	50,00		2	16,67
		Jumlah sosialisasi tentang regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	24	1	4	4	100,00		5	20,83
4.02.01.04.19.02	Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Tanah Milik Pemda Bersertifikat	90	17	15	32	213,33		49	54,44
		Jumlah Dokumen DKPBMD dan DKBM tersusun	12	2	2	2	100,00		4	33,33
4.02.01.04.19.03	Pemanfaatan dan Pindah Tangan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pemanfaatan BMD yang tersusun	12	2	2	2	100,00		4	33,33
4.02.01.04.19.04	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang	6	1	1	1	100,00		2	33,33
		Jumlah buku inventaris	6	1	1	1	100,00		2	33,33
		Jumlah laporan semesteran	12	2	2	2	100,00		4	33,33

4.02.01.15	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun RKA/DPA tepat Waktu</b>	100	100					<b>100</b>	100
4.02.01.15.1	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dok KUA PPAS	4	4					4	100
4.02.01.15.2	Penyusunan Regulasi dan sosialisasi penganggaran dan perbendaharaan keuangan daerah	Jumlah regulasi penatausahaan keu. Daerah	1	1					1	100
		Jumlah sosialisasi regulasi tentang penatausahaan keu.daerah	2	2					2	100
4.02.01.15.4	Penyusunan APBD	Jumlah hari entri RKA-SKPD	15	15					15	100
		Jumlah pembahasan TAPD-DPRD	40	40					40	100
		Jumlah Buku raperda dan perda PAPBD	260	260					260	100
		Jumlah hari entri anggaran kas	6	6					6	100
		Jumlah Perda dan Perpub APBD tersusun	2	2					2	100
4.02.01.15.5	Penyusunan Perubahan APBD	Jumlah perda PAPBD dan Perbup PAPBD	2	2					2	100
		Jumlah hari Entry bersama RKPA Perangkat Daerah	10	10					10	100

		Jumlah hari Pembahasan TAPD dan DPRD	10	10					10	100
		Jumlah Cetak Perda PAPBD dan Perbup PAPBD	160	160					160	100
4.02.01.15.7	Fasilitas pentausahaan belanja non gaji	Jumlah Penerbitan SPP	7000	7000					7000	100!
		Jumlah Penerbitan SP2D	1200	1200					1200	100
		Jumlah buku BKU, Pajak dan register SP2D	3	3					3	100
		Jumlah register SPM dan Buku kas harian	80	80					80	100
4.02.01.15.8	Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai	Jumlah Daftar Gaji PNS	616	616					616	100
		Jumlah Penerbitan SP2D gaji dan SKPP	616	616					616	100
		Jumlah Laporan Bulanan Gaji	12	12					12	100
<b>4.02.01.04.20</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun RKA/DPA tepat Waktu</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>
4.02.01.04.20.01	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	Jumlah dok KUA PPAS	20		4	4	100,00		4	20,00

		Jumlah pedoman penyusunan APBD	15		3	3	100,00		3	20,00
4.02.01.04.20.0 2	Penyusunan APBD	Jumlah Perda APBD dan Perbup APBD	10		2	2	100,00		2	20,00
4.02.01.04.20.0 3	Penyusunan Perubahan APBD	Jumlah Perda PAPBD dan Perbup PAPBD	15		3	3	100,00		3	20,00
<b>4.02.01.04.21</b>	<b>PROGRAM PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH</b>	<b>Persentase Penyerapan Anggaran SKPD sesuai dengan Anggaran Kas</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>		<b>85</b>	<b>85,00</b>
4.02.01.04.21.0 1	Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai	Jumlah daftar gaji	3.750		10.500	10.500	100,00		10500	280,00
		jumlah Cetak SP2D Gaji	9.350		2.482	2.482	100,00		2482	26,55
		jumlah Kartu Kendali Gaji	15.000		3.000	2.900	96,67		2900	19,33
		jumlah register SPM	9350		2482	2482	100,00		2482	26,55
		jumlah register SP2D Gaji	9.350		2.482	2.482	100,00		2482	26,55
		jumlah SKPP	1.000		200	289	144,50		289	28,90
		jumlah SSBP dan laporan gaji bulanan	560		500	504	100,80		504	90,00
4.02.01.04.21.0 2	Fasilitasi penatausahaan belanja Kegiatan	jumlah penerbitan SP2D	65.000		13.000	9.300	71,54		9300	14,31
		jumlah Buku Kas Umum (BKU)	240		48	48	100,00		48	20,00

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

		jumlah posisi kas harian	240		48	48	100,00		48	20,00
		jumlah buku pajak	5		1	1	100,00		1	20,00
		jumlah register SPM	20		4	4	100,00		4	20,00
		jumlah register SP2D	20		4	4	100,00		4	20,00
		jumlah penerbitan SPP	900		180	132	73,33		132	14,67
		jumlah kegiatan peluncuran UP terlaksana	5		1	1	100,00		1	20,00
		jumlah terlaksananya rekon DAK Fisik	20		4	4	100,00		4	20,00
4.02.01.04.21.03	Fasilitasi penatausahaan belanja PPKD	jumlah penerbitan SPP	7.500		9.279	9.277	99,98		9277	123,69
		jumlah penerbitan SPM	7.500		9.279	9.277	99,98		9277	123,69
		jumlah BKU	60		12	12	100,00		12	20,00
		jumlah register SPM	10		2	2	100,00		2	20,00
		jumlah regsiter SP2D	10		2	2	100,00		2	20,00
		jumlah laporan realisasi ADD dan DD	20		4	4	100,00		4	20,00
		jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah tentang Bansos dan Hibah	15		3	3	100,00		3	20,00

5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu</b>						<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun						3	3	#DIV/0!
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2021 yang disusun						1	1	#DIV/0!
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Tahun 2021 yang disusun						1	1	#DIV/0!
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Tahun 2021 yang disusun						1	1	#DIV/0!
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Tahun 2021 yang disusun						1	1	#DIV/0!
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LKPI, SAKIP LKJiP Perangkat Daerah yang disusun						4	4	#DIV/0!
5.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>#DIV/0!</b>



5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN						12	12	#DIV/0!
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan						72	72	#DIV/0!
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi						900	900	#DIV/0!
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun						1	1	#DIV/0!
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semesteran SKPD yang disusun						3	3	#DIV/0!
<b>5.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase bangunan gedung dan kendaraan yang diasuransikan</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan dan bangunan gedung yang diasuransikan						13	13	#DIV/0!
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi perundang-undangan						15	15	#DIV/0!
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>#DIV/0!</b>

5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan						35	35	#DIV/0!
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						83	83	#DIV/0!
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan						68	68	#DIV/0!
		Jumlah belanja penggandaan yang disediakan						140000	<b>140000</b>	#DIV/0!
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan						730	<b>730</b>	#DIV/0!
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu						240	<b>240</b>	#DIV/0!
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah						34	<b>34</b>	#DIV/0!
		Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah						204	<b>204</b>	#DIV/0!
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pengadaan Box Arsip						2500	<b>2500</b>	#DIV/0!
		Jumlah pengadaan rak arsip						20	<b>20</b>	#DIV/0!
		Luasan Fumigasi						1710	<b>1710</b>	#DIV/0!
		Jumlah arsip keuangan yang tertata						250	<b>250</b>	#DIV/0!

5.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor							31	<b>31</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim							96	<b>96</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet							12	<b>12</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor satpam, waker dan cleaning service dalam satu tahun							12	<b>12</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara							9	<b>9</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel								20	<b>20</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara							86	<b>86</b>	<b>#DIV/0!</b>

5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara						11	11	#DIV/0!
5.02.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran						100	100	#DIV/0!
5.02.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah						2	2	#DIV/0!
5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	a. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu						100	100	#DIV/0!
		b. Persentase penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas						100	100	#DIV/0!
		c. Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu						100	100	#DIV/0!
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu						100	100	#DIV/0!
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS						2	2	#DIV/0!
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah KUPA dan PPAS-PERUBAHAN						2	2	#DIV/0!

5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang terverifikasi						39	39	#DIV/0!
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang terverifikas						39	39	#DIV/0!
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang terverifikasi						39	39	#DIV/0!
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA-SKPD yang terverifikasi						39	39	#DIV/0!
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah PERDA Tentang APBD dan PERBUP Tentang Penjabaran APBD						2	2	#DIV/0!
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah PERDA Tentang Perubahan APBD dan PERBUP Tentang Penjabaran Perubahan APBD						6	6	#DIV/0!
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi yang terbit						4	4	#DIV/0!

5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								0	#DIV/0!
		Persentase serapan APBD sesuai Anggaran Kas						87	87	#DIV/0!
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Cetak SP2B Cetak SP2D Cetak SPD Daftar Gaji Kartu kendali gaji Register SP2D Register SPM SKPP SSBP						3010 23.152 42 42 35.000 1.545 23.000 1870 350	3010 23.152 42 42 35.000 1.545 23.000 1870 350	#DIV/0!
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah Rekon Dana Transfer (DAU, DBH, DAK, DID, ADD)						4	4	#DIV/0!
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D						4	4	#DIV/0!

		SP2D Online, Rekon Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank						4	4	#DIV/0!
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Laporan Dana Transfer(DAU,DBH,DAK,DID,ADD						5	5	#DIV/0!
		Laporan pajak						8	8	#DIV/0!
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rekon utang dan piutang, penempatan uang daerah untuk optimalisas						6	6	#DIV/0!
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekon Pajak (Pph Penghasilan ASN), BPJS Kes/Ketenagakerjan, Taspen						4	4	#DIV/0!

5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Perbup Pengelolaan Keuangan Daerah (Perbendaharaan), Perbup Hibah, Bantuan Sosial,						4	4	#DIV/0!
		BanKeu, dan BTT, Perbup UP dan Non Tunai Perda Pokok2 Pengelolaan Keuangan Daerah						1	1	#DIV/0!
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Gaji Sosialisasi Peluncuran UP Sosialisasi Penatausahaan Aplikasi SIPD Sosialisasi Perbup Hibah Bansos, BTT Sosialisasi Perubahan Permendagri 13 Sosialisasi Transaksi Non Tunai						1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	#DIV/0!
5.02.02.2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase PD Yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu</b>						100	100	#DIV/0!
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran yang dilaksanakan						12	12	#DIV/0!



		jumlah Validasi Data HarianPenerimaan dan Pengeluaran						42	42	#DIV/0!
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Realisasi APBD bulanan Jumlah Laporan Semesteran Pemda						1 12 2	1 12 2	#DIV/0!
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbup Pertanggungjawaban APBD Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD						1 1	1 1	#DIV/0!
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Akuntansi Jumlah Sosialisasi Akuntansi						1 1	1 1	#DIV/0!
5.02.02.2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan KewenanganPengelolaan Keuangan Daerah terlaksana</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	#DIV/0!

5.02.02.2.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah pembayaran bunga pinjaman						1	1	#DIV/0!
5.02.02.2.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah bantuan keuangan yang disalurkan						180	180	#DIV/0!
5.02.02.2.09	Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	jumlah dana darurat dan mendesak						1	1	#DIV/0!
5.02.02.2.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	jumlah bagi hasil pajak dan retribusi						1	1	#DIV/0!
5.02.02.2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi pengelolaan data keuangan daerah</b>						100	100	#DIV/0!
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	jumlah pemeliharaan sistem informasi						1	1	#DIV/0!
5.02.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase tertib administrasi pengelolaan data keuangan daerah</b>						100	100	#DIV/0!

5.02.03.2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase pencatatan BMD yang valid</b>						100	100	#DIV/0!
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen DKBMD dan RKPBMMD						2	2	#DIV/0!
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perbud dan Kebijakan Pengelolaan BMD yang tersusun						1	1	#DIV/0!
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pembukuan, inventarisasi BMD						39	39	#DIV/0!
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Pendataan BMD						39	39	#DIV/0!
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Proses Pensertifikatan						80	80	#DIV/0!
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Revaluasi/Penilaian BMD Pemerintah Kabupaten Sampang						1	1	#DIV/0!
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Jumlah Data Pengelolaan BMD yang sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan yang berlaku						39	39	#DIV/0!

5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang						1	1	#DIV/0!
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi/Validasi Barang Milik Daerah						39	39	#DIV/0!
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Induk Inventarisasi BMD						1	1	#DIV/0!
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Regulasi BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk Pengelolaan BMD						1	1	#DIV/0!
5.02.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>a. Persentase realisasi PAD terhadap target PAD</b>						100	100	#DIV/0!
		<b>b. Persentase Penerimaan PBB-P2</b>							0	#DIV/0!
5.02.04.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi PAD terhadap target PAD</b>						100	100	#DIV/0!

5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah data potensi yang terdata						100	<b>100</b>	#DIV/0!
		Jumlah regulasi dan SOP teknis tentang tata kelola pajak daerah						3	<b>3</b>	#DIV/0!
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	terselenggaranya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat tentang pajak daerah						100	<b>100</b>	#DIV/0!
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah WP Pendaftar Pajak						500	<b>500</b>	#DIV/0!
		Jumlah WP Pendataan Pajak						200	<b>200</b>	#DIV/0!
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah BPHTB						700	<b>700</b>	#DIV/0!
		Jumlah penerbitan SPPT-PBB-P2						500000	<b>500000</b>	#DIV/0!
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD Air tanah						120	<b>120</b>	#DIV/0!
		Jumlah SKPD Reklame						131	<b>131</b>	#DIV/0!
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah surat Tegoran dan Tagihan Pajak						200	<b>200</b>	#DIV/0!

5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Pengajuan Keberatan						45	45	#DIV/0!
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SKPDKB						10	10	#DIV/0!
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Rapat evaluasi yang dilakukan dengan SKPD penghasil PAD						1	1	#DIV/0!
		Jumlah rekonsiliasi dengan SKPD penghasil PAD						1	1	#DIV/0!

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 :

1. Penyerapan anggaran yang belum maksimal
2. Masih rendahnya peningkatan PAD
3. Masih tingginya deviasi penyerapan keuangan

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk solusi permasalahan :

1. Melakukan rasionalisasi anggaran kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang Realisasi penyerapan anggarannya belum maksimal namun kalau dilihat dari target kinerja tercapai.
2. Melakukan evaluasi secara konsisten terhadap penyerapan anggaran masing-masing kegiatan dengan mengacu kepada anggaran kas yang telah direncanakan.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang TA. 2022, merupakan turunan dari RKPD TA. 2022 Kabupaten Sampang yang merupakan implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah, dari visi tersebut dijabarkan dalam misi Bupati Sampang yang diadopsi oleh Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaannya BPPKAD melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Tugas pokok dan fungsi yaitu dalam hal pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah baik berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, maupun lain-lain Pendapatan yang Sah. Kemampuan menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan harus diimbangi dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif guna mengamankan baik sisi penerimaan maupun pengeluaran anggaran daerah. Perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah sudah mulai menunjukkan hasil yang akan menjadi pondasi bagi penyempurna kedepan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPKAD Kabupaten Sampang**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan			Des 2019/ Okt 2020	Des 2020/ Okt 2021	Des 2021/ Okt 2022	Des 2022/ Okt 2023	Des 2019/ Okt 2020	Des 2020/ -	Des 2021/ Okt 2022	Des 2022/ Okt 2023	
2	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target			6,50%	6,00%	6,00%	5,00%	11,25%	-	6,00%	5,00%	
3	Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD			Agu-20	Agu-21	Agu-22	Agu-23	Sep-20	-	Agu-22	Agu-23	
4	Persentase Data BMD yang Valid			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
5	Jumlah PAD			179.581.644.475,22	184.326.810.711,00	173.635.481.690,00	190.462.741.494,85	175.518.944.949,09	67.234.217.964,64	173.224.571.690	190.462.741.494	



## **2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

### **I. Tugas Pokok dan Fungsi**

BPPKAD Kabupaten Sampang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan asset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan asset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **II. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi**

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa kendala yang dihadapi BPPKAD Kabupaten Sampang berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian Tugas Pokok dan fungsi dari BPPKAD Kabupaten Sampang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas SDM pengelola keuangan
2. Realisasi Pendapatan masih kurang dari target yang ditetapkan
3. Masih rendahnya peningkatan PAD

4. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang masih terbatas
5. Data BMD perlu terus dilakukan update dan pengelolaan aset daerah perlu ditingkatkan
6. Masih tingginya deviasi penyerapan keuangan

Terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Perangkat Daerah, diantaranya adalah :

Tantangan tersebut adalah :

- ❖ Pengelolaan Pendapatan Tantangannya
  - Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang Masih Rendah
  - Masih rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD
  - Prosentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih Kecil
  - Sumber Daya Manusia ( Aparatur ASN) pengelola Pendapatan yang masih belum Memadai
- ❖ Pengelolaan Keuangan tantangannya adalah :
  - Regulasi dari pemerintah pusat yang Sering berubah;
  - Komitmen dari perangkat daerah Untuk Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan pendapatan dan pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan
  - Kualitas Sumber Daya Manusia ( Aparatur ASN) pengelola keuangan yang masih kurang
- ❖ Pengelolaan Aset Tantangannya :
  - Masih banyak Aset Daerah yang belum memiliki bukti kepemilikan Legal ( Sertifikat )
  - Pengamanan secara administratif, hukum dan fasilitas terhadap Barang Milik Daerah belum maksimal
  - Pencatatan pengurus barang tidak akurat (nilai, asal, jumlah, ganda, klasifikasi
  - Sumber Daya Manusia ( Aparatur ASN) pengelola Aset Daerah yang masih belum memadai

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan 5 tahun ke depan adalah :

- Komitmen dari Kepala Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Bertambahnya Wajib Pajak
- Kondisi dan Situasi stabilitas keamanan yang kondusif
- Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Sampang

- Perkembangan teknologi informasi (IT) yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung penerimaan Pendapatan daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPPKAD Kabupaten Sampang sebagai SKPD penunjang dalam urusan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu adanya rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hal tersebut, maka BPPKAD Kabupaten Sampang melakukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a. Pemuktahiran Basis data Pajak Daerah.
  - b. Penyisiran dan penagihan pajak
  - c. Modernisasi Teknologi Informasi Pajak Daerah
  - d. Penyempurnaan dan harmonisasi regulasi terkait tata kelola pemungutan dan pemanfaatan teknologi
  - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang perpajakan ( Penagih, Pemeriksa, penilai pajak dan juru sita pajak, dll )
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah
  - a. Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA-PD evaluasi dan rekonsiliasi berkala secara triwulanan untuk memantau penatausahaan keuangan Perangkat Daerah
  - b. Pelatihan dan sosialisasi terkait perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan
  - c. Peningkatan SDM Penyusunan Program/Kegiatan, PPK dan Bendahara
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan akuntansi keuangan daerah
  - a. Pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah
  - b. Peningkatan koordinasi dan pengendalian dengan melakukan rekonsiliasi setiap bulan transaksi penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan/perubahan regulasi sesuai ketentuan Perundang-undangan
4. Meningkatkan ketertiban pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD)

- a. Pengamanan secara administratif dan hukum terhadap barang milik daerah (BMD)
- b. Diklat/pelatihan pengurus barang dan pembantu pengurus barang
- c. Identifikasi dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan BPPKAD secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- 4 Perkembangan teknologi dan informasi.

#### **2. 4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil BPPKAD Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi BPPKAD Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Sampang**

<b>BPPKAD</b>											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
	<b>KEUANGAN</b>				<b>390.120.321.317</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>390.120.321.317</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	SAMPANG	<b>Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>37.138.872.144</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	SAMPANG	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>37.138.872.144</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>40.821.502</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>40.821.502</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SAMPANG	jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	8.681.307	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SAMPANG	jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	8.681.307	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SAMPANG	jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	6.959.720	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SAMPANG	jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	6.959.720	

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SAMPANG	jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 dokumen	4.832.691	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SAMPANG	jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 dokumen	4.832.691	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SAMPANG	jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	5.149.922	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SAMPANG	jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	5.149.922	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SAMPANG	jumlah dokumen perubahan DPA	1 dokumen	4.724.392	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SAMPANG	jumlah dokumen perubahan DPA	1 dokumen	4.724.392	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAMPANG	jumlah dokumen evaluasi kinerja	3 dokumen	10.473.470	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAMPANG	jumlah dokumen evaluasi kinerja	3 dokumen	10.473.470	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>31.239.348.262</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>31.239.348.262</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SAMPANG	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Terbayar	14 Bulan	31.197.573.159	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SAMPANG	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Terbayar	14 Bulan	31.197.573.159	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SAMPANG	jumlah SPP yang terverifikasi dalam 1 tahun	900 SPP	23.418.080	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SAMPANG	jumlah SPP yang terverifikasi dalam 1 tahun	900 SPP	23.418.080	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SAMPANG	Jumlah Laporan Keuangan OPD	1 dokumen	10.455.780	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SAMPANG	Jumlah Laporan Keuangan OPD	1 dokumen	10.455.780	

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	SAMPANG	jumlah dokumen laporan fisik bulanan BPPKAD jumlah dokumen laporan keuangan triwulanan jumlah dokumen laporan semesteran bulanan	12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen	7.901.243	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	SAMPANG	jumlah dokumen laporan fisik bulanan BPPKAD jumlah dokumen laporan keuangan triwulanan jumlah dokumen laporan semesteran bulanan	12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen	7.901.243	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Bangunan Gedung dan Kendaraan yang diasuransikan</b>	<b>100%</b>	<b>82.008.930</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Bangunan Gedung dan Kendaraan yang diasuransikan</b>	<b>100%</b>	<b>82.008.930</b>	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	SAMPANG	jumlah kendaraan dan bangunan gedung yang diasuransikan	13 unit	82.008.930	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	SAMPANG	jumlah kendaraan dan bangunan gedung yang diasuransikan	13 unit	82.008.930	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Rasio pegawai yang mengikuti Bimtek dan jumlah ASN OPD</b>	<b>100%</b>	<b>85.339.200</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Rasio pegawai yang mengikuti Bimtek dan jumlah ASN OPD</b>	<b>100%</b>	<b>85.339.200</b>	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SAMPANG	jumlah keikutsertaan dalam peningkatan kapasitas aparatur	12 orang	85.339.200	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SAMPANG	jumlah keikutsertaan dalam peningkatan kapasitas aparatur	12 orang	85.339.200	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.139.090.681</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.139.090.681</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SAMPANG	Jumlah Komponen Listrik	30 jenis	125.737.472	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SAMPANG	Jumlah Komponen Listrik	30 jenis	125.737.472	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SAMPANG	jumlah alat kebersihan jumlah spanduk, umbul-umbul dan bendera	43 jenis 40 buah	85.701.351	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SAMPANG	jumlah alat kebersihan jumlah spanduk, umbul-umbul dan bendera	43 jenis 40 buah	85.701.351	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SAMPANG	jumlah kebutuhan atk	75 jenis	141.637.958	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SAMPANG	jumlah kebutuhan atk	75 jenis	141.637.958	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SAMPANG	jumlah jenis barang cetakan jumlah penggandaan	17 jenis 3000 lembar	57.690.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SAMPANG	jumlah jenis barang cetakan jumlah penggandaan	17 jenis 3000 lembar	57.690.900	

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SAMPANG	jumlah langganan surat kabar	730 exemplar	3.570.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SAMPANG	jumlah langganan surat kabar	730 exemplar	3.570.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SAMPANG	jumlah tamu dinas dalam satu tahun	240 org	12.375.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SAMPANG	jumlah tamu dinas dalam satu tahun	240 org	12.375.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SAMPANG	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	200 kali	342.568.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SAMPANG	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	200 kali	342.568.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SAMPANG	jumlah arsip keuangan yang tertata jumlah pengadaan box arsip jumlah pengadaan rak arsip luasan fumigasi	200 meter/linear 1750 buah 25 unit 2023 meter	369.810.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SAMPANG	jumlah arsip keuangan yang tertata jumlah pengadaan box arsip jumlah pengadaan rak arsip luasan fumigasi	200 meter/linear 1750 buah 25 unit 2023 meter	369.810.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>640.743.845</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>640.743.845</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SAMPANG	jumlah pengadaan peralatan kantor	15 unit	640.743.845	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SAMPANG	jumlah pengadaan peralatan kantor	15 unit	640.743.845	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan jasa penunjang</b>	<b>100%</b>	<b>1.023.217.045</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan jasa penunjang</b>	<b>100%</b>	<b>1.023.217.045</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SAMPANG	Jumlah surat Keluar	1500 surat	12.927.840	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SAMPANG	Jumlah surat Keluar	1500 surat	12.927.840	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SAMPANG	Jumlah Pembayaran listrik, air dan internet	12 bulan	573.889.205	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SAMPANG	Jumlah Pembayaran listrik, air dan internet	12 bulan	573.889.205	



Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SAMPANG	jmlah honor satpam, waker dan cleaning service dalam 1 tahun	192 orang bulan	436.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SAMPANG	jmlah honor satpam, waker dan cleaning service dalam 1 tahun	192 orang bulan	436.400.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>2.873.302.679</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	100%	<b>2.873.302.679</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SAMPANG	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	10 unit	194.932.085	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SAMPANG	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	10 unit	194.932.085	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SAMPANG	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113 unit	135.154.953	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SAMPANG	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113 unit	135.154.953	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SAMPANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam Kondisi Baik	11 unit	2.543.215.641	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SAMPANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam Kondisi Baik	11 unit	2.543.215.641	
	<b>Penataan Organisasi</b>		<b>Persentase terlaksananya promosi pelayanan publik</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Penataan Organisasi</b>		<b>Persentase terlaksananya promosi pelayanan publik</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SAMPANG	Jumlah promosi pelayanan publik	2 kali	15.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SAMPANG	Jumlah promosi pelayanan publik	2 kali	15.000.000	

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	SAMPANG	a. Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu b. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu c. Persentase penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas	a. 100% b. 100% c. 100%	350.907.290.904	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	SAMPANG	a. Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu b. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu c. Persentase penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas	a. 100% b. 100% c. 100%	350.907.290.904	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>1.283.317.250</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>1.283.317.250</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	SAMPANG	Jumlah KUA dan PPAS	2 dokumen	182.687.407	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	SAMPANG	Jumlah KUA dan PPAS	2 dokumen	182.687.407	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	SAMPANG	jumlah KUPA dan PPAS - Perubahan	2 dokumen	128.617.101	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	SAMPANG	jumlah KUPA dan PPAS - Perubahan	2 dokumen	128.617.101	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	SAMPANG	jumlah RKA SKPD yang terverifikasi	39 skpd	236.255.348	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	SAMPANG	jumlah RKA SKPD yang terverifikasi	39 skpd	236.255.348	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	SAMPANG	jumlah perubahan RKA-SKPD yang terverifikasi	39 skpd	101.125.295	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	SAMPANG	jumlah perubahan RKA-SKPD yang terverifikasi	39 skpd	101.125.295	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	SAMPANG	jumlah DPA SKPD yang terverifikasi	39 skpd	19.996.713	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	SAMPANG	jumlah DPA SKPD yang terverifikasi	39 skpd	19.996.713	

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	SAMPANG	jumlah DPPA-SKPD yang terverifikasi	39 SKPD	37.773.364	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	SAMPANG	jumlah DPPA-SKPD yang terverifikasi	39 SKPD	37.773.364	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	SAMPANG	jumlah Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	364.545.278	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	SAMPANG	jumlah Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	364.545.278	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	SAMPANG	jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 dokumen	165.961.989	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	SAMPANG	jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 dokumen	165.961.989	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	SAMPANG	jumlah regulasi yang terbit	4 dokumen	46.354.755	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	SAMPANG	jumlah regulasi yang terbit	4 dokumen	46.354.755	
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Persentase penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas</b>	<b>100%</b>	<b>856.191.659</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Persentase penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas</b>	<b>100%</b>	<b>856.191.659</b>	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	SAMPANG	cetak SP2B cetak SP2D cetak SPD daftar gaji jumlah SKPP jumlah SSBP kartu kendali gaji register SP2D register SPM	3010 lembar 23152 lembar 42 OPD 42 OPD 1870 lembar 350 SSBP 35000 lembar 1545 lembar 23000	240.467.558	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	SAMPANG	cetak SP2B cetak SP2D cetak SPD daftar gaji jumlah SKPP jumlah SSBP kartu kendali gaji register SP2D register SPM	3010 lembar 23152 lembar 42 OPD 42 OPD 1870 lembar 350 SSBP 35000 lembar 1545 lembar 23000	240.467.558	

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

				lembar					lembar		
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	SAMPANG	jumlah Rekon Dana Transfer (DAU, DBH, DAK, DID, ADD)	4 kali	20.693.864	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	SAMPANG	jumlah Rekon Dana Transfer (DAU, DBH, DAK, DID, ADD)	4 kali	20.693.864	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	SAMPANG	jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D Jumlah SP2D online, rekon tranksaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	4 kali 4 kali	94.943.757	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	SAMPANG	jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D Jumlah SP2D online, rekon tranksaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	4 kali 4 kali	94.943.757	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	SAMPANG	jumlah Laporan Dana Transfer (DAU, DBH, DAK, DID, ADD) Jumlah Laporan Pajak	5 dokumen 8 laporan	52.214.434	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	SAMPANG	jumlah Laporan Dana Transfer (DAU, DBH, DAK, DID, ADD) Jumlah Laporan Pajak	5 dokumen 8 laporan	52.214.434	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	SAMPANG	Jumlah rekon utang dan piutang, penempatan uang daerah untuk optimalisasi	6 kali	15.884.894	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	SAMPANG	Jumlah rekon utang dan piutang, penempatan uang daerah untuk optimalisasi	6 kali	15.884.894	

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	SAMPANG	jumlah rekon pajak (Pph Penghasilan ASN), BPJS Kes/Ketenagakerjaan, Taspen	4 kali	34.995.384	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	SAMPANG	jumlah rekon pajak (Pph Penghasilan ASN), BPJS Kes/Ketenagakerjaan, Taspen	4 kali	34.995.384	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	SAMPANG	Jumlah dokumen Bankeu, dan BTT, Perbup UP dan Non Tunai Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jumlah Perbup Pengelolaan Keuangan Daerah (Perbendaharaan), Perbup Hibah, Bantuan Sosial	1 dokumen 4 dokumen	109.372.987	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	SAMPANG	Jumlah dokumen Bankeu, dan BTT, Perbup UP dan Non Tunai Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jumlah Perbup Pengelolaan Keuangan Daerah (Perbendaharaan), Perbup Hibah, Bantuan Sosial	1 dokumen 4 dokumen	109.372.987	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	SAMPANG	jumlah sosialisasi gaji jumlah sosialisasi peluncuran UP jumlah sosialisasi Penatausahaan Aplikasi SIPD jumlah sosialisasi Perbup Hibah Bansos, BTT jumlah sosialisasi Perubahan Permendagri 13 jumlah sosialisasi transaksi non tunai	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	287.618.781	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	SAMPANG	jumlah sosialisasi gaji jumlah sosialisasi peluncuran UP jumlah sosialisasi Penatausahaan Aplikasi SIPD jumlah sosialisasi Perbup Hibah Bansos, BTT jumlah sosialisasi Perubahan Permendagri 13 jumlah sosialisasi transaksi non tunai	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	287.618.781	
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>396.570.156</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>396.570.156</b>	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	SAMPANG	jumlah Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran yang dilaksanakan jumlah Validasi Data Harian Penerimaan dan Pengeluaran	12 kali 45 OPD	128.454.625	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	SAMPANG	jumlah Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran yang dilaksanakan jumlah Validasi Data Harian Penerimaan dan Pengeluaran	12 kali 45 OPD	128.454.625	

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SAMPANG	jumlah Laporan Keuangan Daerah yang tersusun jumlah Laporan Realisasi APBD bulanan jumlah Laporan Semesteran Pemda	1 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	99.671.132	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SAMPANG	jumlah Laporan Keuangan Daerah yang tersusun jumlah Laporan Realisasi APBD bulanan jumlah Laporan Semesteran Pemda	1 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	99.671.132	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	SAMPANG	jumlah Perbup Pertanggungjawaban APBD jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen 1 dokumen	96.617.948	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	SAMPANG	jumlah Perbup Pertanggungjawaban APBD jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen 1 dokumen	96.617.948	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	SAMPANG	jumlah pelatihan Akuntansi jumlah sosialisasi Akuntansi	1 kali 1 kali	71.826.451	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	SAMPANG	jumlah pelatihan Akuntansi jumlah sosialisasi Akuntansi	1 kali 1 kali	71.826.451	
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>348.257.414.387</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>348.257.414.387</b>	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	SAMPANG	jumlah pembayaran bunga pinjaman	1 tahun	11.977.445.000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	SAMPANG	jumlah pembayaran bunga pinjaman	1 tahun	11.977.445.000	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	SAMPANG	jumlah bantuan keuangan yang disalurkan	180 desa	326.889.069.387	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	SAMPANG	jumlah bantuan keuangan yang disalurkan	180 desa	326.889.069.387	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	SAMPANG	jumlah dana darurat dan mendesak	1 tahun	5.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	SAMPANG	jumlah dana darurat dan mendesak	1 tahun	5.000.000.000	

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	SAMPANG	jumlah bagi hasil pajak dan retribusi	1 tahun	4.390.900.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	SAMPANG	jumlah bagi hasil pajak dan retribusi	1 tahun	4.390.900.000	
	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi pengelolaan data keuangan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>113.797.452</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase tertib administrasi pengelolaan data keuangan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>113.797.452</b>	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	SAMPANG	jumlah pemeliharaan sistem informasi	1 aplikasi	113.797.452	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	SAMPANG	jumlah pemeliharaan sistem informasi	1 aplikasi	113.797.452	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	SAMPANG	<b>Persentase laporan BMD yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>740.962.928</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>SAMPANG</b>	<b>Persentase laporan BMD yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>740.962.928</b>	
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		Persentase pencatatan BMD yang valid	<b>100%</b>	<b>740.962.928</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		Persentase pencatatan BMD yang valid	<b>100%</b>	<b>740.962.928</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Jumlah Dokumen DKBMD dan RKPBMMD	2 dokumen	29.994.414	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Jumlah Dokumen DKBMD dan RKPBMMD	2 dokumen	29.994.414	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Penyusunan Perbud dan Kebijakan Pengelolaan BMD	1 dokumen	59.999.656	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Penyusunan Perbud dan Kebijakan Pengelolaan BMD	1 dokumen	59.999.656	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	SAMPANG	jumlah pembukuan, inventarisasi BMD	39 OPD	49.999.875	Penatausahaan Barang Milik Daerah	SAMPANG	jumlah pembukuan, inventarisasi BMD	39 OPD	49.999.875	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	SAMPANG	Jumlah Pendataan BMD	39 OPD	55.999.992	Inventarisasi Barang Milik Daerah	SAMPANG	Jumlah Pendataan BMD	39 OPD	55.999.992	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Proses Pensertifikatan	80 persen	244.976.538	Pengamanan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Proses Pensertifikatan	80 persen	244.976.538	
	Penilaian Barang Milik Daerah	SAMPANG	Revaluasi/Penilaian BMD Pemerintah Kabupaten Sampang	39 OPD	49.999.438	Penilaian Barang Milik Daerah	SAMPANG	Revaluasi/Penilaian BMD Pemerintah Kabupaten Sampang	39 OPD	49.999.438	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Tersusunnya Jumlah Data Pengelolaan BMD yang sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan yang berlaku	39 OPD	49.999.753	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Tersusunnya Jumlah Data Pengelolaan BMD yang sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan yang berlaku	39 OPD	49.999.753	

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Terlaksananya pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang	1 paket	49.999.920	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Terlaksananya pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang	1 paket	49.999.920	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Jumlah Beritan Acara Rekonsiliasi/Validasi Barang Milik Daerah	39 OPD	49.994.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Jumlah Beritan Acara Rekonsiliasi/Validasi Barang Milik Daerah	39 OPD	49.994.000	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Jumlah Buku Induk Inventarisasi BMD	1 dokumen	49.999.734	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	SAMPANG	Jumlah Buku Induk Inventarisasi BMD	1 dokumen	49.999.734	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	SAMPANG	Sosialisasi Regulasi BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk Pengelolaan BMD	1 paket	49.999.608	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	SAMPANG	Sosialisasi Regulasi BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk Pengelolaan BMD	1 paket	49.999.608	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>Persentase realisasi PAD terhadap target PAD</b>	<b>100%</b>	<b>1.333.195.341</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>Persentase realisasi PAD terhadap target PAD</b>	<b>100%</b>	<b>1.333.195.341</b>	
<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>		<b>Persentase realisasi PAD terhadap target PAD</b>	<b>100%</b>	<b>1.333.195.341</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>		<b>Persentase realisasi PAD terhadap target PAD</b>	<b>100%</b>	<b>1.333.195.341</b>	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	SAMPANG	Jumlah data potensi yang terdata Jumlah Regulasi dan SOP teknis tentang tata kelola pajak daerah	100 % 3 regulasi	312.106.013	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	SAMPANG	Jumlah data potensi yang terdata Jumlah Regulasi dan SOP teknis tentang tata kelola pajak daerah	100 % 3 regulasi	312.106.013	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	SAMPANG	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat tentang pajak daerah	100 %	35.500.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	SAMPANG	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat tentang pajak daerah	100 %	35.500.000	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	SAMPANG	Jumlah WP pendaftar pajak Jumlah WP Pendataan Pajak	200 WP 100 WP	727.054.172	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	SAMPANG	Jumlah WP pendaftar pajak Jumlah WP Pendataan Pajak	200 WP 100 WP	727.054.172	
Penagihan Pajak Daerah	SAMPANG	jumlah surat tegoran dan tagihan pajak	200 WP	130.000.000	Penagihan Pajak Daerah	SAMPANG	jumlah surat tegoran dan tagihan pajak	200 WP	130.000.000	



*Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu*

	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	SAMPANG	jumlah pengajuan keberatan	50 WP	25.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	SAMPANG	jumlah pengajuan keberatan	50 WP	25.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	SAMPANG	jumlah rapat evaluasi yang dilakukan dengan SKPD penghasil PAD jumlah rekonsiliasi dengan SKPD penghasil PAD	1 paket 1 paket	103.535.156	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	SAMPANG	jumlah rapat evaluasi yang dilakukan dengan SKPD penghasil PAD jumlah rekonsiliasi dengan SKPD penghasil PAD	1 paket 1 paket	103.535.156	
<b>TOTAL</b>					<b>390.120.321.317</b>					<b>390.120.321.317</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2022 Kabupaten Sampang**

Perangkat Daerah : BPPKAD Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan BPPKAD pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPPKAD**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2022 di dasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada startegi dana arah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang **(RKPD) Tahun 2022** dengan Tema “ Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat ”.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai unsur penunjang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan**  
**Kabupaten Sampang Tahun 2022**

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sampang
<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Pemantapan pemulihan ekonomimelalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah
<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Peningkatan ketahanan sosial masyarakat melalui pengentaskan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat
<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Pemantapan pemulihan ekonomimelalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah
<b>Prioritas Pembangunan 6:</b> Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	<b>Prioritas Pembangunan 6:</b> Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
<b>Prioritas Pembangunan 7:</b> Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<b>Prioritas Pembangunan 7:</b> Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasidan inovasi daerah. <b>dan</b> <b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat

Sumber: RKPD Kabupaten Sampang, 2022

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset daerah serta membantu Bupati Sampang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan daerah dituntut untuk menjadi ujung tombak dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2022**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1	<b>Tujuan:</b>		
	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	9,53
	<b>Sasaran:</b>		
	Meningkatnya PAD	Jumlah PAD	173.635.481.690,00
2	<b>Tujuan:</b>		
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Nilai Opini BPK	WTP
	<b>Sasaran:</b>		
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	a Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan	Des 2021 dan Okt 2022
		b Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6
		c Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD	Agustus 2022
		d Persentase Data BMD yang Valid	100%

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan BPPKAD mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, BPPKAD

mendukung Rumusan **Misi** pembangunan Kabupaten yaitu **Misi 2** dan **Misi 4**. **Misi 2** adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaaan melalui pengembangan aribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kemampuan keuangan daerah. Selain itu BPPKAD juga mendukung **Misi 4** adalah Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, akuntabel dan transparan. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

**b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan**

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra BPPKAD Tahun 2019-2024, BPPKAD Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian **Misi 2** dan **Misi 4**. **Misi 2** adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaaan melalui pengembangan aribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu BPPKAD juga mendukung **Misi 4** adalah Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan BPPKAD Tahun 2022 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPPKAD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 pada sistem aplikasi <https://sampangkab.sipd.kemendagri.go.id/>

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kabupaten Sampang**

BPPKAD					Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
5						<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
5	02					<b>KEUANGAN</b>							<b>393.281.883.914</b>	
5	02	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	SAMPANG	<b>100%</b>	<b>37.138.872.144</b>			<b>100%</b>	<b>38.995.815.751</b>
5	02	01	2,01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	SAMPANG	<b>9 dokumen</b>	<b>40.821.502</b>			<b>9 dokumen</b>	<b>42.862.577</b>
5	02	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	SAMPANG	2 dokumen	8.681.307			2 dokumen	9.115.372
5	02	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD	SAMPANG	1 dokumen	6.959.720			1 dokumen	7.307.706
5	02	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	SAMPANG	1 dokumen	4.832.691			1 dokumen	5.074.326
5	02	01	2,01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA SKPD	SAMPANG	1 dokumen	5.149.922			1 dokumen	5.407.418

5	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA	SAMPANG	1 dokumen	4.724.392			1 dokumen	4.960.612
5	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja	SAMPANG	3 dokumen	10.473.470			3 dokumen	10.997.144
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>		<b>31.239.348.262</b>			<b>100%</b>	<b>32.801.315.675</b>
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Terbayar	SAMPANG	14 Bulan	31.197.573.159			14 Bulan	32.757.451.817
5	02	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah SPP yang terverifikasi dalam 1 tahun	SAMPANG	900 SPP	23.418.080			900 SPP	24.588.984
5	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan OPD	SAMPANG	1 dokumen	10.455.780			1 dokumen	10.978.569
5	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan fisik bulanan BPPKAD jumlah dokumen laporan keuangan triwulanan jumlah dokumen laporan semesteran bulanan	SAMPANG	12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen	7.901.243			12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen	8.296.305
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2,03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Bangunan Gedung dan Kendaraan yang diasuransikan</b>	<b>100%</b>		<b>82.008.930</b>			<b>100%</b>	<b>86.109.377</b>
5	02	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah kendaraan dan bangunan gedung yang diasuransikan	SAMPANG	13 unit	82.008.930			13 unit	86.109.377
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rasio pegawai yang mengikuti Bimtek dan jumlah ASN OPD</b>	<b>100%</b>		<b>85.339.200</b>			<b>100%</b>	<b>89.606.160</b>



5	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah keikutsertaan dalam peningkatan kapasitas aparatur	SAMPANG	12 orang	85.339.200			12 orang	89.606.160
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>1.139.090.681</b>			<b>100%</b>	<b>1.196.045.215</b>
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	SAMPANG	30 jenis	125.737.472			30 jenis	132.024.346
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat kebersihan jumlah spanduk, umbul- umbul dan bendera	SAMPANG	43 jenis 40 buah	85.701.351			43 jenis 40 buah	89.986.419
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah kebutuhan atk	SAMPANG	75 jenis	141.637.958			75 jenis	148.719.856
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan jumlah penggandaan	SAMPANG	17 jenis 3000 lembar	57.690.900			17 jenis 3000 lembar	60.575.445
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah langganan surat kabar	SAMPANG	730 exemplar	3.570.000			730 exemplar	3.748.500
5	02	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah tamu dinas dalam satu tahun	SAMPANG	240 org	12.375.000			240 org	12.993.750
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	SAMPANG	200 kali	342.568.000			200 kali	359.696.400
5	02	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip keuangan yang tertata jumlah pengadaan box arsip jumlah pengadaan rak arsip luasan fumigasi	SAMPANG	200 meter/linear 1750 buah 25 unit 2023 meter	369.810.000			200 meter/linear 1750 buah 25 unit 2023 meter	388.300.500

5	02	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>640.743.845</b>			<b>100%</b>	<b>672.781.037</b>
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan kantor	SAMPANG	15 unit	640.743.845			15 unit	672.781.037
5	02	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan jasa penunjang</b>	<b>100%</b>		<b>1.023.217.045</b>			<b>100%</b>	<b>1.074.377.897</b>
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Keluar	SAMPANG	1500 surat	12.927.840			1500 surat	13.574.232
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran listrik, air dan internet	SAMPANG	12 bulan	573.889.205			12 bulan	602.583.665
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jmlah honor satpam, waker dan cleaning service dalam 1 tahun	SAMPANG	192 orang bulan	436.400.000			192 orang bulan	458.220.000
5	02	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan jasa penunjang</b>	<b>100%</b>		<b>2.873.302.679</b>			<b>100%</b>	<b>3.016.967.813</b>
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	SAMPANG	10 unit	194.932.085			10 unit	204.678.689
5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	SAMPANG	113 unit	135.154.953			113 unit	141.912.701
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam Kondisi Baik	SAMPANG	11 unit	2.543.215.641			11 unit	2.670.376.423

5	02	01	2,13		Penataan Organisasi	Persentase terlaksananya promosi pelayanan publik	100%		15.000.000			100%	15.750.000
5	02	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah promosi pelayanan publik	SAMPANG	2 kali	15.000.000			2 kali	15.750.000
5	02	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>a. Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu b. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu c. Persentase penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas</b>	SAMPANG	<b>a. 100% b. 100% c. 100%</b>	<b>350.907.290.904</b>			<b>a. 100% b. 100% c. 100%</b>	<b>352.108.201.980</b>
5	02	02	2,01		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu		<b>100%</b>	<b>1.283.317.250</b>			<b>100%</b>	<b>1.347.483.113</b>
5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS	SAMPANG	2 dokumen	182.687.407			2 dokumen	191.821.777
5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah KUA dan PPAS - Perubahan	SAMPANG	2 dokumen	128.617.101			2 dokumen	135.047.956
5	02	02	2,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	jumlah RKA SKPD yang terverifikasi	SAMPANG	39 skpd	236.255.348			39 skpd	248.068.115
5	02	02	2,01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah perubahan RKA- SKPD yang terverifikasi	SAMPANG	39 skpd	101.125.295			39 skpd	106.181.560
5	02	02	2,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	jumlah DPA SKPD yang terverifikasi	SAMPANG	39 skpd	19.996.713			39 skpd	20.996.549

Bab III Tujuan dan Sasaran BPPKAD

5	02	02	2,01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	jumlah DPPA-SKPD yang terverifikasi	SAMPANG	39 SKPD	37.773.364			39 SKPD	39.662.032
5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	jumlah Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD	SAMPANG	2 dokumen	364.545.278			2 dokumen	382.772.542
5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	SAMPANG	6 dokumen	165.961.989			6 dokumen	174.260.088
5	02	02	2,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	jumlah regulasi yang terbit	SAMPANG	4 dokumen	46.354.755			4 dokumen	48.672.493
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2,02</b>		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Persentase penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas		<b>100%</b>	<b>856.191.659</b>			<b>100%</b>	<b>899.001.242</b>
5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	cetak SP2B cetak SP2D cetak SPD daftar gaji jumlah SKPP jumlah SSBP kartu kendali gaji register SP2D register SPM	SAMPANG	3010 lembar 23152 lembar 42 OPD 1870 lembar 350 SSBP 35000 lembar 1545 lembar 23000 lembar	240.467.558			3010 lembar 23152 lembar 42 OPD 1870 lembar 350 SSBP 35000 lembar 1545 lembar 23000 lembar	252.490.936

5	02	02	2,02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah Rekon Dana Transfer (DAU, DBH, DAK, DID, ADD)	SAMPANG	4 kali	20.693.864			4 kali	21.728.557
5	02	02	2,02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D Jumlah SP2D online, rekon transaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	SAMPANG	4 kali 4 kali	94.943.757			4 kali 4 kali	99.690.945
5	02	02	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	jumlah Laporan Dana Transfer (DAU, DBH, DAK, DID, ADD) Jumlah Laporan Pajak	SAMPANG	5 dokumen 8 laporan	52.214.434			5 dokumen 8 laporan	54.825.156
5	02	02	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah rekon utang dan piutang, penempatan uang daerah untuk optimalisasi	SAMPANG	6 kali	15.884.894			6 kali	16.679.139
5	02	02	2,02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah rekon pajak (Pph Penghasilan ASN), BPJS Kes/Ketenagakerjaan, Taspen	SAMPANG	4 kali	34.995.384			4 kali	36.745.153

5	02	02	2,02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen Bankeu, dan BTT, Perbup UP dan Non Tunai Perda Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jumlah Perbup Pengelolaan Keuangan Daerah (Perbendaharaan), Perbup Hibah, Bantuan Sosial	SAMPANG	1 dokumen 4 dokumen	109.372.987			1 dokumen 4 dokumen	114.841.636
5	02	02	2,02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah sosialisasi gaji jumlah sosialisasi peluncuran UP jumlah sosialisasi Penatausahaan Aplikasi SIPD jumlah sosialisasi Perbup Hibah Bansos, BTT jumlah sosialisasi Perubahan Permendagri 13 jumlah sosialisasi transaksi non tunai	SAMPANG	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	287.618.781			1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	301.999.720
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2,03</b>		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu		<b>100%</b>	<b>396.570.156</b>			<b>100%</b>	<b>416.398.664</b>
5	02	02	2,03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	jumlah Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran yang dilaksanakan jumlah Validasi Data Harian Penerimaan dan Pengeluaran	SAMPANG	12 kali 45 OPD	128.454.625			12 kali 45 OPD	134.877.356
5	02	02	2,03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah Laporan Keuangan Daerah yang tersusun jumlah Laporan Realisasi APBD bulanan jumlah Laporan Semesteran Pemda	SAMPANG	1 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	99.671.132			1 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	104.654.689

5	02	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah Perbup Pertanggungjawaban APBD jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD	SAMPANG	1 dokumen 1 dokumen	96.617.948			1 dokumen 1 dokumen	101.448.845
5	02	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan Akuntansi jumlah sosialisasi Akuntansi	SAMPANG	1 kali 1 kali	71.826.451			1 kali 1 kali	75.417.774
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2,04</b>		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksana</b>	<b>100%</b>		<b>348.257.414.387</b>			<b>100%</b>	<b>349.325.831.637</b>
5	02	02	2,04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	jumlah pembayaran bunga pinjaman	SAMPANG	1 tahun	11.977.445.000			1 tahun	12.576.317.250
5	02	02	2,04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah bantuan keuangan yang disalurkan	SAMPANG	180 desa	326.889.069.387			180 desa	326.889.069.387
5	02	02	2,04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah dana darurat dan mendesak	SAMPANG	1 tahun	5.000.000.000			1 tahun	5.250.000.000
5	02	02	2,04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	jumlah bagi hasil pajak dan retribusi	SAMPANG	1 tahun	4.390.900.000			1 tahun	4.610.445.000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2,05</b>		<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi pengelolaan data keuangan daerah</b>	<b>100%</b>		<b>113.797.452</b>			<b>100%</b>	<b>119.487.325</b>

5	02	02	2,05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	jumlah pemeliharaan sistem informasi	SAMPANG	1 aplikasi	113.797.452			1 aplikasi	119.487.325
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase laporan BMD yang tepat waktu	SAMPANG	<b>100%</b>	<b>740.962.928</b>			<b>100%</b>	<b>778.011.074</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>2,01</b>		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase pencatatan BMD yang valid		<b>100%</b>	<b>740.962.928</b>			<b>100%</b>	<b>778.011.074</b>
5	02	03	2,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen DKBMD dan RKPBMMD	SAMPANG	2 dokumen	29.994.414			2 dokumen	31.494.135
5	02	03	2,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perbud dan Kebijakan Pengelolaan BMD	SAMPANG	1 dokumen	59.999.656			1 dokumen	62.999.639
5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah pembukuan, inventarisasi BMD	SAMPANG	39 OPD	49.999.875			39 OPD	52.499.869
5	02	03	2,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Pendataan BMD	SAMPANG	39 OPD	55.999.992			39 OPD	58.799.992
5	02	03	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Proses Pensertifikatan	SAMPANG	80 persen	244.976.538			80 persen	257.225.365
5	02	03	2,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Revaluasi/Penilaian BMD Pemerintah Kabupaten Sampang	SAMPANG	39 OPD	49.999.438			39 OPD	52.499.410
5	02	03	2,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Jumlah Data Pengelolaan BMD yang sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan yang berlaku	SAMPANG	39 OPD	49.999.753			39 OPD	52.499.741
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang	SAMPANG	1 paket	49.999.920			1 paket	52.499.916
5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Beritan Acara Rekonsiliasi/Validasi Barang Milik Daerah	SAMPANG	39 OPD	49.994.000			39 OPD	52.493.700



5	02	03	2,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Induk Inventarisasi BMD	SAMPANG	1 dokumen	49.999.734			1 dokumen	52.499.721
5	02	03	2,01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Regulasi BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk Pengelolaan BMD	SAMPANG	1 paket	49.999.608			1 paket	52.499.588
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase realisasi PAD terhadap target PAD</b>	<b>100%</b>		<b>1.333.195.341</b>			<b>100%</b>	<b>1.399.855.108</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>2,01</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	Persentase realisasi PAD terhadap target PAD		<b>100%</b>	<b>1.333.195.341</b>			<b>100%</b>	<b>1.399.855.108</b>
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah data potensi yang terdata Jumlah Regulasi dan SOP teknis tentang tata kelola pajak daerah	SAMPANG	100 % 3 regulasi	312.106.013			100 % 3 regulasi	327.711.314
5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat tentang pajak daerah	SAMPANG	100 %	35.500.000			100 %	13.181.881
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah WP pendaftar pajak Jumlah WP Pendataan Pajak	SAMPANG	200 WP 100 WP	727.054.172			200 WP 100 WP	787.500.000
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	jumlah surat tegoran dan tagihan pajak	SAMPANG	200 WP	130.000.000			200 WP	136.500.000
5	02	04	2,01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah pengajuan keberatan	SAMPANG	50 WP	25.000.000			50 WP	26.250.000
5	02	04	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah rapat evaluasi yang dilakukan dengan SKPD penghasil PAD jumlah rekonsiliasi dengan SKPD penghasil PAD	SAMPANG	1 paket 1 paket	103.535.156			1 paket 1 paket	108.711.914
<b>TOTAL</b>									<b>390.120.321.317</b>				<b>393.281.883.914</b>

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPKAD

BPPKAD mengampu urusan Unsur Penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan. Program-program BPPKAD pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan **Misi 2** dan **Misi 4**. **Misi 2** adalah “ Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaaan melalui pengembangan arbisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif ” dan **Misi 4** adalah “ Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik ” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022.

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022**  
**Kabupaten Sampang**

BPPKAD					Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
5	02				<b>KEUANGAN</b>				
5	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>37.138.872.144</b>	
5	02	01	2,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	<b>9 dokumen</b>	<b>40.821.502</b>	
5	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	8.681.307	
5	02	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	6.959.720	
5	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 dokumen	4.832.691	
5	02	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	5.149.922	
5	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA	1 dokumen	4.724.392	

5	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja	3 dokumen	10.473.470
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>31.239.348.262</b>
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Terbayar	14 Bulan	31.197.573.159
5	02	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah SPP yang terverifikasi dalam 1 tahun	900 SPP	23.418.080
5	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan OPD	1 dokumen	10.455.780
5	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan fisik bulanan BPPKAD jumlah dokumen laporan keuangan triwulanan jumlah dokumen laporan semesteran bulanan	12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen	7.901.243
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2,03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Bangunan Gedung dan Kendaraan yang diasuransikan</b>	<b>100%</b>	<b>82.008.930</b>
5	02	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah kendaraan dan bangunan gedung yang diasuransikan	13 unit	82.008.930
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rasio pegawai yang mengikuti Bimtek dan jumlah ASN OPD</b>	15 orang	<b>85.339.200</b>
5	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah keikutsertaan dalam peningkatan kapasitas aparatur	12 orang	85.339.200
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.139.090.681</b>
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	30 jenis	125.737.472
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat kebersihan jumlah spanduk, umbul- umbul dan bendera	43 jenis 40 buah	85.701.351
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah kebutuhan atk	75 jenis	141.637.958
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan jumlah penggandaan	17 jenis 3000 lembar	57.690.900
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah langganan surat kabar	730 exemplar	3.570.000
5	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu dinas dalam satu tahun	240 org	12.375.000

5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	200 kali	342.568.000
5	02	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip keuangan yang tertata jumlah pengadaan box arsip jumlah pengadaan rak arsip luasan fumigasi	200 meter/linear 1750 buah 25 unit 2023 meter	369.810.000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>640.743.845</b>
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan kantor	15 unit	640.743.845
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan jasa penunjang</b>	<b>100%</b>	<b>1.023.217.045</b>
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Keluar	1500 surat	12.927.840
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran listrik, air dan internet	12 bulan	573.889.205
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah honor satpam, waker dan cleaning service dalam 1 tahun	192 orang bulan	436.400.000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan jasa penunjang</b>	<b>100%</b>	<b>2.873.302.679</b>
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	10 unit	194.932.085
5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113 unit	135.154.953
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam Kondisi Baik	11 unit	2.543.215.641
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2,13</b>		<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase terlaksananya promosi pelayanan publik</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>
5	02	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah promosi pelayanan publik	2 kali	15.000.000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>a. Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu b. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu c. Persentase penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas</b>	<b>a. 100% b. 100% c. 100%</b>	<b>350.907.290.904</b>

5	02	02	2,01		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>1.283.317.250</b>
5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS	2 dokumen	182.687.407
5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah KUPA dan PPAS - Perubahan	2 dokumen	128.617.101
5	02	02	2,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	jumlah RKA SKPD yang terverifikasi	39 skpd	236.255.348
5	02	02	2,01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah perubahan RKA- SKPD yang terverifikasi	39 skpd	101.125.295
5	02	02	2,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	jumlah DPA SKPD yang terverifikasi	39 skpd	19.996.713
5	02	02	2,01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	jumlah DPPA-SKPD yang terverifikasi	39 SKPD	37.773.364
5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	jumlah Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	364.545.278
5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 dokumen	165.961.989
5	02	02	2,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	jumlah regulasi yang terbit	4 dokumen	46.354.755
5	02	02	2,02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas</b>	<b>100%</b>	<b>856.191.659</b>
5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	cetak SP2B cetak SP2D cetak SPD daftar gaji jumlah SKPP jumlah SSBP kartu kendali gaji register SP2D register SPM	3010 lembar 23152 lembar 42 OPD 42 OPD 1870 lembar 350 SSBP 35000 lembar 1545 lembar 23000 lembar	240.467.558
5	02	02	2,02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah Rekon Dana Transfer (DAU, DBH, DAK, DID, ADD)	4 kali	20.693.864

5	02	02	2,02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D Jumlah SP2D online, rekon transaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	4 kali 4 kali	94.943.757
5	02	02	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	jumlah Laporan Dana Transfer (DAU, DBH, DAK, DID, ADD) Jumlah Laporan Pajak	5 dokumen 8 laporan	52.214.434
5	02	02	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah rekon utang dan piutang, penempatan uang daerah untuk optimalisasi	6 kali	15.884.894
5	02	02	2,02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah rekon pajak (Pph Penghasilan ASN), BPJS Kes/Ketenagakerjaan, Taspen	4 kali	34.995.384
5	02	02	2,02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen Bankeu, dan BTT, Perbup UP dan Non Tunai Perda Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jumlah Perbup Pengelolaan Keuangan Daerah (Perbendaharaan), Perbup Hibah, Bantuan Sosial	1 dokumen 4 dokumen	109.372.987
5	02	02	2,02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah sosialisasi gaji jumlah sosialisasi peluncuran UP jumlah sosialisasi Penatausahaan Aplikasi SIPD jumlah sosialisasi Perbup Hibah Bansos, BTT jumlah sosialisasi Perubahan Permendagri 13 jumlah sosialisasi transaksi non tunai	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	287.618.781
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2,03</b>		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	<b>100%</b>	<b>396.570.156</b>
5	02	02	2,03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	jumlah Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran yang dilaksanakan jumlah Validasi Data Harian Penerimaan dan Pengeluaran	12 kali 45 OPD	128.454.625
5	02	02	2,03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah Laporan Keuangan Daerah yang tersusun jumlah Laporan Realisasi APBD bulanan jumlah Laporan Semesteran Pemda	1 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	99.671.132
5	02	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah Perbup Pertanggungjawaban APBD jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen 1 dokumen	96.617.948

5	02	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan Akuntansi jumlah sosialisasi Akuntansi	1 kali 1 kali	71.826.451
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2,04</b>		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>348.257.414.387</b>
5	02	02	2,04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	jumlah pembayaran bunga pinjaman	1 tahun	11.977.445.000
5	02	02	2,04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah bantuan keuangan yang disalurkan	180 desa	326.889.069.387
5	02	02	2,04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah dana darurat dan mendesak	1 tahun	5.000.000.000
5	02	02	2,04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	jumlah bagi hasil pajak dan retribusi	1 tahun	4.390.900.000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2,05</b>		<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi pengelolaan data keuangan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>113.797.452</b>
5	02	02	2,05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	jumlah pemeliharaan sistem informasi	1 aplikasi	113.797.452
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase laporan BMD yang tepat waktu	<b>100%</b>	<b>740.962.928</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>2,01</b>		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase pencatatan BMD yang valid	<b>100%</b>	<b>740.962.928</b>
5	02	03	2,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen DKBMD dan RKPBM	2 dokumen	29.994.414
5	02	03	2,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perbud dan Kebijakan Pengelolaan BMD	1 dokumen	59.999.656
5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah pembukuan, inventarisasi BMD	39 OPD	49.999.875
5	02	03	2,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Pendataan BMD	39 OPD	55.999.992
5	02	03	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Proses Pensertifikatan	80 persen	244.976.538
5	02	03	2,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Revaluasi/Penilaian BMD Pemerintah Kabupaten Sampang	39 OPD	49.999.438
5	02	03	2,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Jumlah Data Pengelolaan BMD yang sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan yang berlaku	39 OPD	49.999.753
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang	1 paket	49.999.920
5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Beritan Acara Rekonsiliasi/Validasi Barang Milik Daerah	39 OPD	49.994.000

5	02	03	2,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Induk Inventarisasi BMD	1 dokumen	49.999.734
5	02	03	2,01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Regulasi BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk Pengelolaan BMD	1 paket	49.999.608
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase realisasi PAD terhadap target PAD</b>	<b>100%</b>	<b>1.333.195.341</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>2,01</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi PAD terhadap target PAD</b>	<b>100%</b>	<b>1.333.195.341</b>
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah data potensi yang terdata Jumlah Regulasi dan SOP teknis tentang tata kelola pajak daerah	100 % 3 regulasi	312.106.013
5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat tentang pajak daerah	100 %	35.500.000
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah WP pendaftar pajak Jumlah WP Pendataan Pajak	200 WP 100 WP	727.054.172
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	jumlah surat tegoran dan tagihan pajak	200 WP	130.000.000
5	02	04	2,01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah pengajuan keberatan	50 WP	25.000.000
5	02	04	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah rapat evaluasi yang dilakukan dengan SKPD penghasil PAD jumlah rekonsiliasi dengan SKPD penghasil PAD	1 paket 1 paket	103.535.156
<b>TOTAL</b>								<b>390.120.321.317</b>

Pada Tahun 2022 BPPKAD akan melaksanakan Urusan Unsur Penunjang di bidang keuangan dengan total anggaran Rp 390.120.321.317. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **4 program, 16 kegiatan dan 70 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di BPPKAD dan lingkup Kabupaten Sampang.

Inovasi BPPKAD Kabupaten Sampang dalam pengelolaan pajak, diantaranya adalah :

1. E-BPHTB
2. TEKAN ENTER (TErtib laporan Keuangan dan ANggaran dengan ENtry TERpadu)
3. KOMPAKK BRO (KelOla Manajemem Pendapatan Aset aKuntansi, Keuangan Bisa pROses)



## **BAB V P E N U T U P**

Renja Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu “Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat”, dan penjabaran dari tujuan BPPKAD Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu “ Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah dan Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien”

Hasil evaluasi atas Renja BPPKAD Kabupaten Sampang tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 95% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja BPPKAD Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran BPPKAD yang telah dituangkan dalam Renstra BPPKAD Tahun 2019-2024. Adapun tujuan BPPKAD adalah “ Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah dan Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien” yang didukung oleh sasaran yaitu: Meningkatkan PAD dan Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Pada tahun 2022 BPPKAD akan melaksanakan Urusan Unsur Penunjang di bidang keuangan dengan total anggaran Rp 390.120.321,317 mendukung dan melaksanakan 4 program, 16 kegiatan dan 70 sub kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di BPPKAD dan lingkup Kabupaten Sampang.

### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka pelaksanaan Renja Tahun 2022, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja BPPKAD Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;

3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI